

TINJAUAN BUKU
SHADES OF GREY
(*A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965–1998*)
Jusuf Wanandi: Singapore: Equinox, 2012

INGATAN PRIBADI DAN SEJARAH

Taufik Abdullah

Ketua Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Diterima: 13-1-2014

Direvisi: 17-1-2014

Disetujui: 24-1-2014

Dalam *Symposium on Southeast Asian Studies*, yang diadakan untuk menghormati seorang profesor yang akan pensiun, di Vrije Universiteit, Amsterdam (2001) saya menyajikan sebuah makalah, yang berjudul *Neither “out there” nor “the other”*. Dalam makalah singkat, yang kemudian diterbitkan SEASREP di Manila, saya sampai pada kesimpulan bahwa ketika menulis karya sejarah akademis tentang Asia Tenggara, apalagi tentang negeri sendiri, saya sadar benar bahwa saya tidak berbicara tentang hal-hal yang terjadi “*di sana*” (di negeri orang) dan bukan pula tentang “orang lain” (bangsa lain). Perasaan ini semakin terasa kalau saya berhadapan dengan sejarah kontemporer—yaitu rentetan peristiwa yang terasa seperti langsung dialami. Akan tetapi, memang sejarah kontemporer bukanlah sebagaimana dikatakan seorang teoretikus “*a foreign country*”, tempat orang berbuat yang aneh-aneh.

Keyakinan ini bertambah kuat juga setelah saya membaca buku *Shades of Grey*, memoir Jusuf Wanandi. Meskipun buku ini mengisahkan pengalaman pribadi sang penulis dalam dunia perpolitikan Indonesia, suasana yang diuraikannya menggugah apa yang rasanya pernah saya alami. Senang, marah, dongkol, dan sebagainya adalah berbagai corak perasaan yang pernah saya alami ketika berbagai peristiwa politik di tanah air terjadi. Tetapi lebih daripada itu, buku ini dengan begitu saja mengingatkan kita—atau setidaknya saya—bahwa berkisah tentang peristiwa sosial-politik kontemporer tanah air sebenarnya kita berhadapan dengan tiga lapis pengetahuan.

Lapis pertama, boleh dikatakan “terbuka”—peristiwanya pernah kita baca di koran, dengar di radio, dan bahkan saksikan lewat siaran TV dan sebagainya. Peristiwa itu mungkin pernah pula dinikmati atau diperdebatkan atau bahkan dipergunjingkan dengan nada penghargaan atau sinisme. Pada *lapis pertama* ini kita berhadapan dengan pengetahuan tentang “apa, bila, di mana, dan siapa”. Siapa mengangkat “siapa” menjadi “menteri” (umpamanya) “bila” dan “di mana “pelantikan” itu diadakan? “Siapa” yang membuat “apa” tentang sesuatu dan “bila”? Dan entah apa lagi.

Lapis kedua, boleh dikatakan “setengah terbuka”, yaitu ketika jawaban “mengapa” ingin didapatkan. Maka beberapa kemungkinan muncul begitu saja. *Pertama*, kejadian itu bisa diterangkan berdasarkan *rentetan kausalitas* yang jelas tampak. “Dia diangkat Presiden menjadi menteri karena diusulkan oleh partai pendukung pemerintah”. *Kedua*, bertolak dari *interpretasi atau analisa situasi* “Meskipun bukan anggota partai koalisi, tetapi tampaknya Presiden percaya akan kemampuan dan kesetiaannya”. *Ketiga*, *gosip dan kabar angin*, “Tentu saja dia diangkat, bukankah Presiden hutang budi padanya. Waktu Presiden masih begini dan begitu, dialah yang menolong”. Tapi apakah hal ini benar? Pada lapis ini kita mungkin berhadapan dengan peristiwa yang terjadi “di belakang layar dan sayup-sayup dikabarkan dan dibicarakan”.

Adapun *lapis ketiga* ialah kasus yang sama sekali tidak diketahui publik dan hanya diketahui

oleh mereka yang terlibat secara langsung. Publik hanya bisa menduga-duga apa yang terjadi sesungguhnya. Publik tidak mengetahui realitas empirik yang sesungguhnya. Tahu-tahu “sudah terjadi begitu saja” atau malah yang terasa hanya akibatnya saja. Tiba-tiba suatu hal seperti telah terjadi atau berubah begitu saja.

Saya tekankan ketiga lapis pengetahuan ini karena beberapa memoar politik yang sempat saya baca hanya bermain pada *lapis pertama* dan kadang-kadang pada *lapis kedua*. Adapun *lapis ketiga* sama sekali tak disentuh, padahal saya merasa pasti bahwa dalam beberapa peristiwa penting yang telah terjadi sang pengisah adalah saksi dan bahkan pelaku dari sesuatu yang seperti terjadi begitu saja itu.

Jadi bagi saya memoar yang sempat saya baca itu hanya berfungsi sebagai “alat pengingat” saja. Atau paling-paling sebagai pemberi kisah yang utuh dari kepingan-kepingan berita yang sempat saya baca secara terpenggal-penggal. Jadi, fungsinya tak lebih daripada sekadar memperjelas masalahnya saja. Keunggulan buku Jusuf Wanandi ini ialah bahwa buku ini lebih menekankan *lapis ketiga*, meskipun kadang-kadang—entah disengaja, entah tidak—terasa ia tidak terlalu menggubris *lapisan satu* dan *dua* yang memang jauh lebih kaya dan lebih kompleks. Dengan kata lain, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada pengalaman langsung dan sekadarnya pada *lapisan kedua*, dan kadang-kadang tak begitu peduli dengan *lapisan pertama*, yang mungkin umum diketahui oleh *political public*, kecuali sebagai pengantar ke arah *lapisan ketiga*. Ia pun seperti menghindar dari kupasan atau analisa hipotetis yang terdapat dalam *lapisan kedua*. Ia menolak dengan keras, misalnya, kemungkinan Soeharto terlibat dalam G-30-S dan yakin bahwa *the real culprits* adalah PKI.

Hanya saja hal-hal yang dikatakan sepintas lalu ini kadang-kadang bisa juga menimbulkan perdebatan. Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa hanya kelompok Islam radikal yang mencoba membunuh Sukarno. Mungkin juga, tetapi bagaimana dengan perwira AURI, Maukar yang menembak istana dari kapal terbang? (hlm. 75). Sambil lalu dikatakannya bahwa Wakil Presiden Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri karena

“peristiwa Madiun”. Padahal, peristiwa itu terjadi ketika Bung Hatta telah menjabat Perdana Menteri, setelah kabinet Amir Syarifuddin yang menandatangani ‘perjanjian Renville’, ditolak KNIP (hlm. 76). Maka janganlah heran kalau PKI biasa sekali menuduh bahwa “peristiwa Madiun” adalah hasil provokasi Hatta. Buku ini juga mengatakan—lagi-lagi sepintas lalu saja—bahwa Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1959. Pada hal peristiwa ini terjadi pada tahun 1960. Jadi, bukan ketika Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 diumumkan. Foto Prawoto (ketua Masyumi) dan Sjahrir (ketua PSI) yang sedang melihat Surat Keputusan Presiden itu mengharukan juga. Bukankah keputusan itu boleh dikatakan secara praktis merupakan awal sesungguhnya dari gaya pemerintahan yang otoriter meskipun memakai sebutan “Demokrasi Terpimpin”?

Tetapi “kekeliruan” detail ini dan lain-lain tidak terlalu mengganggu rekonstruksi *lapisan dua* dan *tiga* yang dikisahkannya. Apalagi peristiwa-peristiwa ini terjadi sebelum tahun 1965, jadi bukan masa yang menjadi fokus perhatian. Hanya saja, kadang-kadang dalam berkisah pada *lapisan ketiga* ini Jusuf Wanandi tidak pula selamanya terbuka, apalagi kalau reputasi tokoh yang dikisahkan bisa menjadi taruhan. Siapakah nama tokoh-tokoh Golkar menjelang Pemilu 1971? Selanjutnya, bagaimanakah strategi dan taktik pemilu yang dijalankan Golkar, organisasi yang memang sudah umum diketahui, hanyalah *electoral machine* (atau sebagaimana disebut buku ini Soeharto’s *political instrument*) saja, dalam pemilu yang selalu dimenangnya? Buku ini hanya mengisahkan semua ini pada tahap *lapisan pertama* saja. Jadi sudah diketahui, tetapi bagaimana dengan kabar-kabar yang sangat “tidak rahasia” (*lapisan dua*) yang biasa juga jadi pembicaraan bisik-bisik?

Bagimanapun juga memoar ini adalah salah satu buku terpenting yang diterbitkan tentang zaman Orde Baru. Bukankah salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang otoriter ialah sifat kerahasiaan yang tinggi? Buku ini membuka tabir dari beberapa episode dan proses politik yang penting dengan jelas.

Beberapa kasus menarik: persaingan Soeharto dengan Nasution dalam sidang MPRS—sudah

menjadi pengetahuan umum, tetapi buku ini lebih memperjelas permasalahannya. Dengan jelas juga dikatakan keberpihakan Jusuf Wanandi dan kelompok Katolik kepada Soeharto dalam persaingan internal ABRI. Dalam memoar ini Jusuf Wanandi *in retrospect* menyesalkan juga usahanya yang membuka jalan bagi Soeharto untuk tampil menjadi penguasa tunggal. Kupasannya tentang Soeharto sebagai pribadi dan Presiden boleh dikatakan suatu *expose* yang mendalam, tetapi sayangnya baru disadari ketika semua telah berlalu.

Renggangnya hubungan Ali Moertopo dari Soeharto segera disinyalir *political public* ketika ia diangkat menjadi Menteri Penerangan. Adapun putusnya hubungan akrab Benny Moerdani dengan sang Presiden diketahui *political public* secara pasti ketika ia diberhentikan sebagai Panglima ABRI beberapa bulan sebelum waktunya. Akibat selanjutnya, publikpun telah menduga juga putusnya hubungan CSIS dengan Soeharto, meskipun *the political public* tidak tahu bahwa Jusuf selama bertahun-tahun selalu memberi masukan rahasia kepada Presiden tentang berbagai hal, khususnya tentang masalah luar negeri. Tetapi, apakah yang terjadi di belakang semua ini? Bisik-bisik (jadi menurut *Lapisan Dua*) mengatakan antara lain karena kelakuan anak-anak Soeharto yang semakin dewasa, tetapi juga semakin berkelakuan aneh-aneh. Sigit kabarnya malah sempat kalah di perjudian dua juta US\$. Benny Moerdani marah. Hal ini sebenarnya telah diketahui dalam sistem pengetahuan pada *lapisan dua*. Dan konon, entah benar, entah tidak, diberitakan juga betapa repotnya pak Dubes Indonesia di Amerika Serikat, Susilo Sudarman, menyelamatkan sang putra.

Dalam kasus Timor Timur memoar ini menyatakan bahwa Presiden Soeharto ingat juga dengan Pembukaan UUD yang menyatakan—“Kemerdekaan adalah hak semua bangsa”. (Saya harus minta maaf karena dalam hati saya sempat “menuduh” pak Harto lupa akan kalimat ini). Dalam kasus ini, menurut Jusuf Wanandi, pemerintah praktis menjalankan strategi Benny Moerdani yang militeristik, bukannya yang direncanakan CSIS dan Ali Moertopo. Akibatnya, Timor Timur menjadi beban politik dan ekonomi, bahkan juga terpuruknya reputasi internasional yang melelahkan. Jadi, dalam menghadapi peris-

tiwa yang penting ini Benny Moerdani lebih dibimbing oleh insting militerisme. Betapapun akrabnya hubungan pribadi Jusuf dengan Benny, tetapi dalam buku ini ia beberapa kali menyebut kenaiifan Benny Moerdani dalam politik.

Tentang pencalonan Sudharmono sebagai Wakil Presiden, buku ini memberi konfirmasi pada gosip politik yang telah sempat beredar. ABRI sebenarnya tidak setuju ia menjadi Wakil Presiden—jadi masuk akal juga kalau dalam memoarnya (yang mungkin dituliskan orang lain) Soedharmono tidak menyinggung masalah ini, meskipun bisa diperkirakan bahwa ia pasti tahu juga sikap ABRI ini. Adapun tentang kisah kucing-kucingan antara Soeharto dengan ABRI, yang tak mau lagi “kena”, tentang pencalonan Try Soetrisno, juga sempat menjadi gunjingan publik di waktu itu. Hubungan Try dengan Benny yang akrab telah diduga publik ketika terjadi Peristiwa Tanjung Priok—sebuah peristiwa yang sampai kini terasa masih memprihatinkan. Mungkin karena tidak langsung berhubungan dengan dirinya memoar Jusuf Wanandi ini tidak melanjutkan kisah dari dinamika politik selanjutnya dari peristiwa yang menggenaskan ini.

Mengenai keberhasilan Try sebagai calon Wakil Presiden tampaknya memoar ini berbicara menurut satu versi. Karena versi lain (jadi *lapisan kedua*) juga sempat beredar pada waktu itu.

Hal yang menarik juga, tetapi sama sekali tidak berada dalam *lapisan satu* dan *lapisan dua* ialah usaha Jusuf Wanandi untuk menolong nasib eks PKI atau yang dicurigai PKI dengan pergi ke Geneva minta kemungkinan ICRC untuk menolong mereka (1977). Lebih penting lagi nasihatnya diterima Menteri RRC, yang ingin rehabilitasi hubungan dengan Indonesia, agar langsung berhadapan dengan Soeharto. Ternyata nasihatnya diterima dan Soeharto bersedia menjalin kembali hubungan diplomatik dengan RRC. Jusuf Wanandi pun berkomentar, “*I thought to myself, I’ve done one thing right*”.

Memoar adalah ingatan tentang pengalaman yang ingin dikisahkan. Jadi, memoar pada dasarnya adalah hasil pilihan subjektif. Tidak semua yang dialami yang teringat dan tidak semua yang teringat dikisahkan atau direkonstruksi. Ukuran dari mutu memoar bukanlah pada subjektivitas dari

pilihan peristiwa yang dikisahkan bahkan juga bukan pada penilaian subjektif yang disampaikan, tetapi pada kejujuran dalam menyampaikan *apa yang dikisahkan* dan *pandangan yang subjektif* tentang apa yang dikisahkan. Memang memoar bukanlah sejarah yang menuntut objektivitas—di samping ketepatan rekonstruksi—tetapi pada subjektivitas yang disampaikan dengan jujur. Tidak kurang pentingnya ialah sifat memoar yang *reflektif*. Memoar adalah juga perenungan tentang berbagai peristiwa yang telah dilalui dan dialami dan bahkan juga pemikiran dan renungan yang sempat terpikirkan dan terenungkan.

Dengan menulis buku ini Jusuf Wanandi telah menyampaikan beberapa hal yang pantas dan harus dihargai. Memang benar memoar pribadi tidak selamanya bisa mengubah uraian kesejarahan yang mungkin telah umum diterima, sebagai “*accepted history*”. Tetapi, bukankah sejarah barulah ada ketika pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu itu—entah yang terjadi seribu tahun yang lalu atau bahkan pada tahun yang baru saja berlalu—telah ditulis atau dikisahkan? Hanya

saja seketika rekonstruksi sejarah telah ingin disampaikan maka ketika itu pula *langgam* atau *gaya bahasa* dan *pilihan kata* memainkan peranan yang penting. Kedalaman atau tingkat *intimacy* dari sang pengisah tidak selalu diperlihatkan oleh panjang pendek kisah dari peristiwa sejarah yang disampaikannya, tetapi sering juga oleh langgam dan gaya bahasa dan pilihan kata. Jadi andaipun buku ini tidak mempertebal uraian kesejarahan, pemahaman yang jauh lebih mendalam yang diberikannya—melalui informasi *lapisan ketiga*—bisa mengubah alur kisah. Langgam bahasa dan pilihan kata bisa juga “mengatakan sesuatu tentang sesuatu”. Dengan begini pemahaman yang lebih akurat akan dinamika dan bahkan struktur masa kontemporer yang telah dilalui bangsa lebih bisa didapatkan.

Akhirnya, harus dikatakan juga bahwa sebuah sumbangan yang berharga untuk memahami sejarah kontemporer bangsa telah kita dapatkan dengan terbitnya buku *Shades of Grey*. Memang ternyata juga sejarah bukanlah soal hitam dan putih yang penuh kepastian.